

---

## Kepentingan Ekonomi Filipina Terhadap Tiongkok Melalui Kerangka Belt and Road Initiative Tahun 2018

Kadek Ari Sumadi Dwipradinata<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, A.A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

---

### Abstrak

Penelitian ini mencoba membahas mengenai kepentingan ekonomi Filipina terhadap Tiongkok melalui kerangka *Belt and Road Initiative*. Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan dua konsep, yakni : pertama, konsep kepentingan nasional milik Donald E. Nuechterlein, yang menjelaskan bahwa kepentingan merupakan sebuah kebutuhan yang kompleks dari suatu negara dalam hubungan dengan negara lainnya yang berada di luar lingkungan eksternalnya. Kedua, konsep Foreign Direct Investment , yang menjelaskan bahwa investasi asing langsung dapat menjadi jembatan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari para investor luar negeri dalam jangka waktu yang panjang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi menjadi kepentingan yang diprioritaskan Filipina terhadap Tiongkok terutama melalui kerangk BRI. Hal itu ditandai dengan pencapaian peningkatan nilai perdagangan ekspor-impor dan investasi asing langsung, sehingga dapat mendorong mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menjadi tujuan utama Filipina. Tidak hanya itu, dengan menjalankan *grand strategy pivot to China*, kerjasama BRI juga medatangkan berbagai manfaat-manfaat yang menguntungkan bagi perekonomian Filipina, baik dari pariwisata, perbedayaan manusia, serta naiknya eksistensi dan status negaranya.

**Kata-kunci** : Filipina, Kepentingan Nasional, *Grand Strategy*, *Belt and Road Initiative*

---

### Abstract

*This study tries to discuss the economic interests of the Philippines towards China through the framework of the Belt and Road Initiative. In reviewing this research, the researcher uses two concepts, namely: first, Donald E. Nuechterlein's concept of national interest, which explains that interests are a complex need of a country in relation to other countries that are outside its external environment. Second, the concept of Foreign Direct Investment, which explains that foreign direct investment can be a bridge to advance the economic growth of a country from foreign investors in the long term. The results of this study indicate that economic interests are prioritized by the Philippines against China, especially through the Belt and Road Initiative framework. This is indicated by encouraging an increase in the value of export-import trade and direct investment, so that it can encourage the realization of infrastructure which is the Philippines' main goal. Not only that, by implementing the grand strategy pivot to China, BRI's cooperation also brings various beneficial benefits to the Philippine economy, both from tourism, human diversity, as well as*

*improving the existence and status of the country.*

*Keywords : Philippines, National Interest, Grand Strategy, Belt and Road Initiative*

---

**Kontak Penulis**

Kadek Ari Sumadi Dwipradinatha

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bali, Indonesia, 80237

Telp: +62 813 3897 1864

E-mail : Pradinatha97@gmail.com

## PENDAHULUAN

Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Namun keuntungan ini tidak terlepas dari adanya konflik di Laut China Selatan dengan Tiongkok, sehingga pada tahun 2016 Filipina berinisiatif untuk membuka hubungannya dengan Tiongkok baik untuk meredakan ketegangan maupun mencari peluang dalam mencapai kepentingannya (Hanggoro, 2016). Hal itu ditandai dengan ketertarikan Filipina terhadap *Belt and Road Initiative* milik Tiongkok yang bertujuan untuk menghubungkan ekonomi dunia dengan berbagai bantuan infrastruktur, investasi dan perdagangan melalui 2 komponen utamanya.

Akhirnya pada tahun 2018 Filipina dan Tiongkok berhasil menyepakati Kerjasama dengan nilai investasi sebesar US\$ 24 Miliar. Menariknya, Filipina sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Tiongkok pada masa pemerintahan sebelumnya karena menjalankan politik luar negeri balancing dan memilih Amerika Serikat sebagai sekutunya terbesarnya (Damping, 2020). Namun hal ini dipatahkan melalui kebijakan independent milik Duterte yang bernama *pivot to China*. Kebijakan ini juga menandakan bahwa ada isu yang sifatnya vital dan harus diprioritaskan, sehingga bergabungnya Filipina ke Tiongkok merupakan suatu upaya ataupun strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kepentingan negaranya.

Dewasa ini, untuk lebih mendorong mencapai kepentingannya, Filipina berkomitmen untuk menyelesaikan konflik di wilayah sengketa dengan Tiongkok secara damai dan terbuka. Hal itu dilatarbelakangi oleh keyakinan Filipina terhadap Tiongkok yang mampu menjadi pemain global

berpengaruh bagi negaranya, serta dapat mengurangi ancaman dari aktifitas Tiongkok di area konflik yang bisa menimbulkan kerugian (Karima, 2020). Tidak hanya itu, melalui BRI, Filipina melihat potensi yang menguntungkan untuk lebih memajukan kepentingannya, baik dalam sector perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur. Sebab, pada masa pemerintahan Duterte, Duterte memiliki ambisi untuk mengantarkan Filipina sebagai negara yang maju akan pembangunan infrastruktur atau disebut dengan *golden age of infrastructure* (Debora, 2017).

Maka dari itu, tergabungnya Filipina terhadap Tiongkok dan keikutsertaannya terhadap kerangka BRI menjadi salah satu langkah awal ataupun batu loncatan dalam mewujudkan kepentingan yang berfokus serta berkaitan dengan ekonomi. Hubungan diplomatik yang semakin meningkat antara kedua negara juga memberikan pengaruh yang dituangkan lewat berbagai manfaat yang menguntungkan. Harapannya, dari pengimplementasian *pivot to China* sebagai wujud *grand strategy* Filipina dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dan dapat mengamankan, memajukan, serta mendorong kepentingan nasionalnya.

Kajian pustakan pertama yang dijadikan landasan penelitian adalah karya dari Arti, Priadarsini & Nugraha (2021) dengan judul Analisis Perubahan Politik Luar Negeri Sri Lanka Terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa. Tulisannya menyebutkan bahwa untuk mencapai kepentingannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan politik luar negeri Sri Lanka di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa. Hal ini berkaitan dengan perubahan politik luar negeri Filipina di bawah pemerintahan Duterte, dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan terdorongnya

perubahan politik luar negerinya terhadap Tiongkok.

Kajian pustaka kedua merupakan karya dari Desmiari, Sushanti & Resen (2018) berjudul Analisis Kepentingan Tiongkok Terhadap Asia Tengah Melalui Jalur Sutra Baru Rute Darat. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa Tiongkok memiliki *grand strategy* seperti jalur sutra baru rute darat untuk mencapai kepentingan nasionalnya terutama di Asia Tengah. Bahwasannya, dengan dibungkus oleh jalur sutra baru rute darat di Asia Tengah dapat mewujudkan atau mendukung kepentingan yang ingin dicapainya. Hal ini berkaitan dengan *grand strategy pivot to China* milik Filipina, sehingga dengan menjalankan strategi ini, Filipina dapat mencapai kepentingan nasionalnya dari Tiongkok terutama melalui BRI. Selain itu, tulisannya juga menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlin yang dapat membantu penulis untuk melihat kepentingan nasional Filipina secara mendetail.

Kajian Pustaka ketiga berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina Tentang Laut Cina Selatan Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte, yang merupakan karya dari Jennifer Beatrice G.P (2020). Dalam tulisannya menyebutkan bahwa konflik di Laut Cina selatan dan kebijakan Domestik milik Duterte menjadi latarbelakang Filipina untuk merubah politik luar negerinya, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan nasional dan kepentingan ekonomi menjadi motif kepentingan nasional Filipina saat ini. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk lebih melihat perubahan politik luar negeri Filipina dibawah pemerintahan Duterte. Namun perlu digaris bawahi bahwa penulis akan lebih memfokuskan kepentingan ekonomi Filipina dari perubahan politik luar negeri negaranya, terutama melalui kerangka kerjasama BRI.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berusaha untuk menafsirkan data yang didapatkan secara deskriptif atau kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan sumber data yang berjenis sekunder sebagai sumbernya, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal maupun dokumen-dokumen. Unit analisis penelitian ini menggunakan negara sebagai analisisnya karena bisa melihat bagaimana Filipina mengambil keputusan dalam bekerjasama dengan Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga langkah untuk menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data & penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Letak dan Perekonomian Negara Filipina

Jika dilihat secara geografis dan astronomis, Filipina memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan jalur perdagangan internasional dan memiliki sumber daya yang baik. Namun hal tersebut juga menimbulkan dampak seperti konflik serta rawannya bencana alam. Walaupun Filipina memiliki total populasi sebesar 102,624,209 juta jiwa pada tahun 2016, sebanyak 44 % masih berada di bawah garis kemiskinan (Flores, 2017).

Sebagai negara berkembang, perekonomian Filipina pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang baik. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 7,1% dan meningkatnya produk domestik bruto sebesar 1,2% (Ventura, 2016). Sehingga dari pertumbuhan ini, dapat membantu Filipina untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, adanya faktor cuaca yang buruk menyebabkan komoditas unggulannya di sektor pertanian

terkadang mengalami kontraksi. Maka Filipina mengimbanginya dengan mengalihkan perekonomiannya ke sektor investasi, konstruksi, industri dan jasa. Hasilnya pun dapat dilihat dari banyaknya minat konsumen terhadap produk industri Filipina dan berhasil mencatat nilai ekspor sebesar \$ 57,406. Tidak hanya pisang, Filipina juga memiliki sepuluh komoditas ekspor-impor lainnya yang banyak menyumbangkan keuntungan, salah satunya yang terbesar adalah produk elektronik. Selain itu, Filipina tentunya memiliki mitra perdagangan terbesarnya. Pada sektor ekspor, Jepang menjadi negara yang paling banyak meminati produk elektronik Filipina. Sedangkan sektor impor, produk elektronik dari Tiongkok paling banyak diminati oleh Filipina (oec.world, 2020).

### **Dinamika Hubungan Filipina dan Tiongkok**

Sebelum Filipina berinisiatif membuka lagi hubungannya dengan Tiongkok, Filipina sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Tiongkok dikarenakan konflik di Laut China Selatan. Walaupun begitu, pada tahun 1975 Filipina dan Tiongkok juga sempat mencapai hubungan kerjasama di segala bidang untuk menangani isu regional maupun internasional (Indonesia.cri.cn, 2005). Akan tetapi, dengan adanya perebutan klaim di wilayah konflik, membuat hubungan kedua negara kembali memanas. Hal itu diawali ketika Tiongkok bersikap tegas untuk menolak pengakuan dari negara-negara yang bersangkutan sebab didasari oleh sejarah yang ada. Puncaknya, pada tahun 2013 Filipina di masa pemerintahan Aquino III membawa konflik ini ke *Permanent Court of Arbitration* karena Tiongkok dirasa melanggar daerah teritorialnya. Namun, dengan dibawanya masalah ini ke PCA, membuat Tiongkok semakin menunjukkan kapabilitasnya.

Hal itu tentu memberikan dampak buruk bagi Filipina, baik pada stabilitas kawasan termasuk perekonomiannya. Kapabilitas Tiongkok menyebabkan penurunan nilai ekspor pisang sebesar 2/3 pada tahun 2015 dan membangun pulau buatan di kawasan konflik pada tahun 2016 (Hasugian, 2016). Untuk mengurangi berbagai ancaman dari Tiongkok, Filipina di bawah pemerintahannya Duterte mengambil langkah yang damai. Aksinya dibuktikan dengan kunjungan Duterte ke Tiongkok untuk menyetujui berbagai perjanjian kerjasama dan MoU. Tindakan kooperatif dari Duterte merupakan langkah awal untuk mengurangi ancaman dan mencapai kepentingannya, sehingga Filipina memiliki peluang yang besar untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Maka dari itu, kepentingan ekonomi dari Filipina juga akan bersinergi dengan kerangka *Belt and Road Initiative* untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

### **Respon Filipina Terhadap BRI**

Sesudah tersepekatinya berbagai perjanjian kerjasama melalui *Joint Statement of China and the Philippines* pada tahun 2016. Kedua negara berjanji akan terus meningkatkan hubungan bilateral serta kerjasama yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak hanya itu, Filipina juga melihat peluang dari kebijakan BRI yang dipromosikan oleh Tiongkok untuk mewujudkan berbagai kepentingannya. Sehingga pada tahun 2018, Filipina merespon dengan baik dan langsung menandatangani kerjasama BRI melalui MoU, serta sepakat untuk berkerja berdampingan pada sektor yang menjadi kepentingan Bersama, terutama infrastruktur (Pia, 2018). Respon yang baik dari Filipina terhadap BRI sendiri dikarenakan sejalan dengan tujuan utama negaranya yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Maka hal ini dapat menjadi

momentum bagi Filipina untuk memperbaiki kemunduran pada sektor infrastrukturnya, dimana menurut data *Global Competitiveness Report*, Filipina berada pada posisi 87 dari 139 negara yang disurvei pada tahun 2014-2015 (Esplanada, 2015). Hal terpenting yang mendasari Filipina untuk merespon BRI adalah sebuah kerjasama ekonomi yang berindikasikan jangka panjang, sehingga dipercaya dapat mengakhiri permasalahan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di dalam negerinya dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

### ***Pivot to China Sebagai Grand Strategy Filipina***

*Grand strategy pivot to China* pada masa pemerintahan Duterte telah membawa perubahan yang signifikan bagi Filipina, yang mana strategi ini bertujuan untuk menghadapi berbagai permasalahan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Strategi ini juga merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan hubungannya ke level yang lebih tinggi terhadap Tiongkok, karena merupakan salah satu bentuk diplomasi yang berdasarkan pada *multy-country foreign policy* guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Beatrice, 2020). Selama 3 hari kunjungan Duterte ke Tiongkok, kedua negara berhasil merumuskan berbagai perjanjian kerjasama dan MoU. Menariknya, kebanyakan perjanjian yang dirumuskan oleh kedua negara berfokus pada kerjasama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga manandakan bahwa ada hal penting yang ingin di capai oleh Filipina. Keterlibatan Tiongkok dalam *grand strategy* Filipina juga tidak terlepas dari inisiatif BRI yang dimilikinya, sebab BRI akan lebih mendorong mencapai kepentingannya, baik membuka perdagangan bebas, pengembangan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Walaupun sektor ekonomi menjadi prioritas utama dalam kepentingan Filipina, *pivot to China* milik Duterte juga diperoleh dari ketidakpuasannya terhadap kebijakan *Balancing* terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dipercaya akan menimbulkan berbagai kerugian, termasuk pada perekonomian Filipina (Damping, 2020). Maka dari itu, pendekatan kooperatif yang dilakukan Duterte terhadap Tiongkok bertujuan untuk mempertahankan, mengamankan, serta memajukan kepentingan ekonomi yang tentunya akan memberikn keuntungan yang lebih besar.

### **Faktor-Faktor Perubahan Politik Luar Negeri Filipina**

Sebelum menentukan *grand strategy pivot to China*, dimungkinkan ada beberapa faktor yang mendorong pergeseran politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Duterte. Faktor pertama adalah faktor eksternal di Laut China Selatan terhadap Tiongkok. Faktor eksternal dapat menjadi bukti bahwa situasi di sistem internasional dapat membawa perubahan bagi politik luar negeri Filipina untuk membuka hubungannya terhadap Tiongkok. Bahwasannya, ketegangan yang terjadi di laut cina selatan disebabkan oleh saling merebutkan klaim di wilayah tersebut, terutama pada kepulauan Spratly. Perebutan klaim antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi yang besar, baik cadangan gas, minyak, menjadi jalur perdagangan internasional dan lain sebagainya (BBC Indonesia, 2011). Dengan begitu, Filipina pada masa pemerintahan Aquino III mengambil langkah untuk menggugat Tiongkok melalui PCA pada tahun 2013 dan berhasil memenangkannya pada tahun 2016. Namun putusan PCA tidak menggetarkan langkah Tiongkok untuk terus beraktifitas di

kawasan tersebut, sehingga keputusan Tiongkok untuk mengabaikan putusan PCA akan berpengaruh pada kedaulatan Filipina, termasuk perekonomiannya. Buktinya ditandai dengan pertumbuhan perekonomian Filipina pasca konflik tidak sebaik pada masa pemerintahan Duterte.

Faktor kedua adalah faktor Duterte sebagai pengambil keputusan di Filipina. Dewasa ini, peran pemimpin dapat menjadi faktor terpenting untuk menentukan arah PLN suatu negara. Hal ini berkaitan dengan Duterte yang merubah politik luar negerinya untuk bergabung ke Tiongkok dan untuk mencapai kepentingannya. Sebagai pengambil keputusan, Duterte kerap kali mengambil kebijakan-kebijakan yang kontroversial di dalam negerinya, seperti mengadili oknum-oknum yang berkaitan dengan kejahatan, sebab tingginya tingkat kriminalitas akan berdampak pada penderitaan rakyatnya (Basmalah, 2016). Hukuman tersebut sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi, namun dengan berbagai kebijakan yang kontroversialnya, membuat Duterte mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat karena melanggar HAM. Maka dari itu, Duterte menganggap Amerika Serikat tidak dapat mendukung berbagai kebijakan yang diambilnya, sehingga Duterte lebih memilih Tiongkok sebagai sekutu barunya karena dapat mendukung dan mendorong mewujudkan kepentingannya melalui kebijakan yang dibuatnya (Rahman, 2019).

Faktor ketiga adalah faktor kemiskinan dan infrastruktur. Faktor ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan infrastruktur masih menjadi persoalan utama bagi Filipina, sehingga dibutuhkan peran negara seperti Tiongkok untuk mengatasi permasalahan yang

tentunya berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi di Filipina disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti kurangnya pendapatan dari sumber daya alam, banyaknya tingkat korupsi, serta kurang layakannya infrastruktur, sebab infrastruktur dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara (world bank, 2005). Dalam konteks ini, dari masa ke masa pemerintahan, Filipina telah menjalankan berbagai kebijakan terkait upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, namun dari setiap pemerintahan yang memimpin tentu mempunyai kekurangan yang mengakibatkan kegagalan. Salah satunya pada masa pemerintahan Aquino III yang hanya menurunkan 1% dari 25 juta penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dari program yang dikeluarkannya (Raharjo, 2019). Diketahui juga bahwa pada masa pemerintahan Aquino III hanya memprioritaskan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingannya. Dengan begitu, Filipina di bawah pemerintahan Duterte benjanji akan mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur yang masih menjadi persoalan utama dengan bekerjasama terhadap Tiongkok, terutama melalui kerangka *Belt and Road Initiative*.

### **Analisis Kepentingan Ekonomi Filipina Terhadap Tiongkok Melalui BRI**

Donald E. Nuechterlein menyatakan bahwa kepentingan merupakan kebutuhan yang dirasakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini sejalan dengan kepentingan ekonomi Filipina dalam hubungannya terhadap Tiongkok, sehingga dalam mendorong kepentingannya tersebut, Filipina sangat bergantung pada kerjasama BRI guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bahwasannya, ketergantungan Filipina terhadap Tiongkok didasari oleh kemajuan ekonominya yang

sangat signifikan, baik dari kebijakan maupun strateginya. Salah satu strategi itu adalah BRI yang berjalan pada sektor ekonomi.

Nuechterlein (1976) juga menyatakan bahwa ada tambahan nilai ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain untuk mendatangkan keuntungan. Hal ini ditandai ketika kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dibawah kerangka BRI dan menyepakati investasi sebesar \$24 miliar dari Tiongkok (Philstar, 2018). Tidak hanya itu, adapun tambahan nilai ekonomi lainnya yang didapatkan Filipina, seperti peningkatan volume perdagangan ekspor-impor yang mencapai \$50 miliar dan meningkat sebesar 67% (Jinhua, 2018). Dari peningkatan volume perdagangan ini nantinya akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Filipina, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang masih menjadi persoalan utama di negaranya.

Tambahan nilai ekonomi lainnya datang dari peningkatan FDI (*foreign direct investment*). Hal ini ditandai sejak tahun 2016 Filipina mendapatkan investasi asing langsung sebesar \$8,28 miliar dan dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai sebesar \$5,64 miliar (Statista.com, 2022). Bahwasannya, peningkatan FDI di Filipina dapat menjadi sumber terbesar untuk mendanai berbagai program dalam jangka waktu yang panjang, sehingga nantinya akan menstabilkan ataupun memajukan pertumbuhan ekonomi negaranya. Maka dari itu, kemiskinan yang dapat dikatakan sebagai isu yang vital bagi Filipina dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur dibawah kerangka kerjasama BRI.

### **Program Build, Build, Build Menjadi Tujuan Utama Filipina**

Pembangunan infrastruktur memanglah menjadi tujuan utama Filipina saat ini, dimana tujuan ini dikemas melalui berbagai program-program yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Jika dilihat, hal ini sejalan dengan elemen *economic stake* milik Nuechterlein, dimana ia menyatakan bahwa kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi menjadi tujuan utama suatu negara (Nuechterlein, 1976). Sehingga untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negaranya, Filipina mempercayai Tiongkok dapat mendukung berbagai programnya yang juga selaras dengan kerangka BRI. Perlu kita tahu bahwa berbagai program ekonomi milik Duterte dinamai dengan *Dutertenomics*, yang mana program yang paling ditonjolkan saat ini adalah program *Build, Build and Build*.

Program *build, build, build* juga menandakan bahwa Filipina ingin memfokuskan kerjasamanya dengan Tiongkok pada sektor infrastruktur. Sebab dari fakta yang ada, sekitar 70 miliar peso terbuang setiap tahunnya dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai sehingga membuat efisiensi di segala sektor terhambat (De Vera, 2018). Dalam realisasinya, program ini mengutamakan pembangunan pada sektor-sektor yang mejadi prioritas utama, seperti transportasi dan komunikasi. Hal itu ditandai dengan upaya Filipina untuk memodernisasi Pelabuhan Davao karena akan menjadi titik perhentian jalur perdagangan maritimnya. Sejalan dengan itu, untuk mendanai pembangunan infrastrukturnya, Filipina telah menerima sekitar \$7,3 miliar dari total investasi sebesar \$24 miliar pada tahun 2017 (beltandroad.hktcd.com, 2018). Tidak hanya pelabuhan, ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun seperti proyek bendungan, proyek irigasi, proyek kereta api, jalan tol dan jembatan serta pusat



rehabilitas (Rebena, 2018). Maka dari itu, tidak dapat dihindari bahwa Tiongkok dan BRI hadir di waktu yang tepat untuk menjadi sumber aliran dana dari investasi asing langsung yang diberikan, sehingga sangat berguna untuk tercapainya kepentingan ekonomi Filipina dalam jangka waktu yang panjang.

### **Manfaat Dari *Pivot to China* Dalam Kerangka BRI**

Sejak Filipina menjalankan politik luar negerinya untuk bergabung dengan Tiongkok dan merespon dengan baik kerangka BRI, Filipina berusaha untuk mengasampingkan Amerika Serikat karena dirasa belum bisa mengatasi isu yang vital di negaranya. Hal ini sejalan dengan kedua elemen dari Nuechterlein (1976) yaitu *national prestige dan attitude of allies and friend*. Sehingga dapat dikatakan bahwa langkah dari Filipina merupakan suatu bentuk pertahanan dalam dunia multipolar, baik untuk mengamankan maupun memajukan kepentingan ekonominya. Bahwasannya, investasi asing langsung dari Tiongkok terutama melalui kerangka BRI juga sangat berpengaruh untuk mendatangkan berbagai manfaat yang menguntungkan, baik untuk pariwisata, pemberdayaan manusia hingga naiknya eksistensi dan statusnya di luar negaranya. Pada sektor pariwisata, Filipina merasakan peningkatan kunjungan wisatawan terutama wisatawan dari Tiongkok sebesar tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,26 juta pengunjung pada tahun 2016 (Venzon, 2019). Sebab, industri pariwisata dapat menjadi sektor terpenting untuk membangun perekonomian negaranya.

Manfaat yang menguntungkan lainnya dari Tiongkok dan BRI adalah pemberdayaan manusia, dimana proyek-proyek pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan pekerjaan bagi hampir 21.000 warga Filipina. Selain itu,

perusahaan-perusahaan besar Tiongkok juga dapat memberikan peluang besar bagi masyarakat Filipina dengan melakukan investasi asing langsung di berbagai sektor industrinya (Fernando, 2020). Sedangkan, manfaat terakhir yang menguntungkan bagi Filipina adalah meningkatnya eksistensi dan statusnya di dunia internasional, terutama di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan bangkitnya Filipina untuk menjadi macan ekonomi Asia berkat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan (Ventura, 2017). Maka dari itu juga, manfaat-manfaat diatas dapat dikatakan bahwa investasi asing langsung dari Tiongkok sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Filipina dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan keuntungan tambahan bagi kepentingan ekonominya.

### **PENUTUP**

Dinamika hubungan antara Filipina dan Tiongkok akhirnya kembali pulih disaat Filipina menjalankan *grand strategy pivot to China* dibawah pemerintahan Duterte. Hal ini dapat dilihat melalui respon baik Filipina terhadap BRI, bertindak kooperatif untuk mengesampingkan konflik, serta berprinsip pada *multy-country foreign policy*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Filipina ingin mewujudkan kepentingan ekonominya yang dipercaya dapat dicapai dari bantuan maupun dukungan Tiongkok. Dengan bantuan konsep kepentingan nasional milik Nuechterlein dan konsep *Foreign Direct Investement* dalam hubungan internasional, keduanya digunakan sebagai pisau analisis untuk lebih menjelaskan apa kepentingan ekonomi Filipina terhadap Tiongkok melalui BRI.

Maka dari itu, adapun pencapaian keuntungan yang didapatkan Filipina untuk

kepentingan ekonominya, seperti peningkatan volume perdagangan ekspor impornya, beserta peningkatan pada FDI. Sehingga aliran dana dari investasi asing dapat menjadi sumber dan manfaat yang menguntungkan terutama untuk mencapai kepentingan ekonominya, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang menjadi tujuan utama negara Filipina.

## Daftar Pustaka

- Arti, I. A. B. U., Priadarsini, N. W. R & Nugraha, A. A. B. S. W. (2021). "Analisis Perubahan Politik Luar Negeri Sri Lanka Terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa". *Jurnal Hubungan Internasional: Vol 1 No 1*.
- Beltandroad. (2018). "BRI Funding Sees China and the Philippines Commit to Building Bridges". <https://beltandroad.hktdc.com/en/insights/bri-funding-sees-china-and-philippines-commit-building-bridges>. Diakses pada, 27 Juli 2022.
- BBC Indonesia (2011). "Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan". [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict). Diakses pada, 1 Juli 2022.
- Damping, Gerald. (2020). "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan". *Jurnal of International Relations*, Vol 6, No 4, 2020, hal 619-628.
- Desmiari, N. W. P. E., Sushanti, S. & Resen, P. T. K. (2018). "Analisis Kepentingan Tiongkok Terhadap Asia tengah Melalui Jalur Sutra Baru Rute Darat". *Jurnal Hubungan Internasional: Vol 1 No 2*.
- Debora, Yantani. (2017, Desember 24). "AIBB, Penantang Baru Bank Dunia dan IMF dari Cina". <https://tirto.id/aiib-penantang-baru-bank-dunia-dan-imf-dari-cina-cCcj>. Diakses pada, 13 Desember 2021.
- De Vera, B. (2018a). Jica: Kemacetan Lalu Lintas Sekarang Menelan Biaya P3,5 miliar per hari. *Penyelidik Harian Filipina*. Diperoleh dari. <https://newsinfo.inquirer.net/970553/jica-traffic-congestion-now-costs-p3-5-billion-a-day-metro-manila-traffic-jica-cost-of-traffic#ixzz57zaZON5M>. Diakses pada, 27 Juli 2022.
- Donald E. Nuechterlein. (1976). "National Interest: A new Approach", *Orbis*. Vol 23. No. 1 (Spring), hlm 57.
- Esplanada. J. E. (2015). "PH Moves Up in World Infra Rankings". <https://business.inquirer.net/193977/ph-moves-up-in-world-infra-rankings>. Diakses pada, 16 Oktober 2022
- Fernando, Jonina A. (2020). "China's Belt and Road Initiative in The Philippines". *Asia Pacific Bulletin*; No. 542.
- Flores, H. (2017). "Self-rated Poverty at Record Low in 2016". <https://www.philstar.com/headlines/2017/01/17/1662946/self-rated-poverty-record-low-2016>. Diakses pada, 16 Oktober 2022
- Hasugian. M.R. (2016). "Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut China Selatan". <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan>. Diakses pada, 20 Oktober 2022.
- Hanggoro, Marcheilla A.P.H. (2016, Oktober 19). "Duterte: Hanya China yang Bisa Bantu Filipina". <https://www.merdeka.com/dunia/duterte-hanya-china-yang-bisa-bantu-filipina.html>. diakses pada 8 Oktober 2021.
- Hennida, C., Wardhana, A., Sahab, A., Saadah, K., Pratiwi, F. I. & Ratmoko, E.. (2020). "Respons Negara-Negara Asia Tenggara Terhadap Dominasi China". Diakses pada, 20 Juli 2022.

- Indonesia.cri.cn. (2019). "Tiongkok Menjadi Negara Sumber Modal Asing terbesar bagi Filipina". [http://indonesian.cri.cn/20190313/5a7e852a-  
adf3-61dc-d143-38fcdc0827cd.html](http://indonesian.cri.cn/20190313/5a7e852a-adf3-61dc-d143-38fcdc0827cd.html). Diakses pada, 20 Juli 2022.
- P, Jennifer Beatrice G. (2020). "Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina Tentang Laut Cina Selatan Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte". Jurnal Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Vol 5 No. 2.
- Oec.world. "Philippines (PHL) Exports, Imports and Trade Partners". [https://oec.world/en/profile/country/phl/?yearS  
elector1=exportGrowthYear22&yearlyTradeFlo  
wSelector=flow1](https://oec.world/en/profile/country/phl/?yearSelector=exportGrowthYear22&yearlyTradeFlowSelector=flow1). Diakses pada, 19 Oktober 2022.
- Pssat. (2018). "*Philippines's Changing Approach to South China Sea Dispute: Duterte's Administration, Two Years On*". *Academic Essay, Political and International Relations..*
- Raharjo Sandy, N. I. (2019). "Membangun Konektivitas di Perbatasan: Kerja Sama Subregional Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina". Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Rabena, A. J. (2018). "The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines". Policy Forum Article. Asia Pac Policy Stud. 2018; 5: 690.
- Rahman, D. F. (2019). "Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Filipina: Upaya Presiden Rodrigo Duterte Untuk Mengakhiri Dependensi Ke Amerika Serikat". Jurnal of International Relations, Volume 5, Nomer 1, Hal 218.
- Ranada, Pia. (2018, November 26). *DOCUMENT: Philippines, China deal on Belt anf Road Initiative*. [https://www.rappler.com/nation/217572-  
document-philippines-china-deal-belt-road-  
initiative/](https://www.rappler.com/nation/217572-document-philippines-china-deal-belt-road-initiative/). Diakses pada, 12 Desember 2018.
- Statista.com (2022). "Foreign Direct Investment Net Inflows in the Philippines From 2013 to 2021". [https://www.statista.com/statistics/608240/phi  
ppines-foreign-direct-investment-net-inflows/](https://www.statista.com/statistics/608240/philippines-foreign-direct-investment-net-inflows/). Diakses pada, 20 Juli 2022.
- Venzon, C. (2019). "Duterte Under the Gun Over Chinese Influx into Philippines". [https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-  
Insight/Duterte-under-the-gun-over-Chinese-  
influx-into-Philippines](https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Duterte-under-the-gun-over-Chinese-influx-into-Philippines). Diakses pada, 27 Juli 2022.
- Ventura, B. (2017). "Pertumbuhan Tercepat di Dunia, Filipina Macan Ekonomi Asia". [https://ekbis.sindonews.com/berita/1174418/35/  
pertumbuhan-tercepat-di-dunia-filipina-macan-  
ekonomi-asia](https://ekbis.sindonews.com/berita/1174418/35/pertumbuhan-tercepat-di-dunia-filipina-macan-ekonomi-asia). Diakses pada, 28 Juli 2022.
- Ventura, B. (2016). "Pertumbuhan Ekonomi Filipina Tercepat di Asia". [https://ekbis.sindonews.com/berita/1156173/35/  
pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-  
asia#:~:text=Menurut%20ekonom%20yang%20d  
isurvei%20Bloomberg%2C%20kebijakan%20teg  
as%20Presiden,melampaui%20China%20yang  
%20sebesar%206%2C7%25%20dan%20Vietnam  
%206%2C4%25..](https://ekbis.sindonews.com/berita/1156173/35/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia#:~:text=Menurut%20ekonom%20yang%20disurvei%20Bloomberg%2C%20kebijakan%20tegas%20Presiden,melampaui%20China%20yang%20sebesar%206%2C7%25%20dan%20Vietnam%206%2C4%25..) Diakses pada, 16 Oktober 2022.